

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv	
HALAMAN MOTTO.....	vii	
HALAM PERSEMBAHAN.....	viii	
KATA PENGANTAR.....	ix	
DAFTAR ISI.....	xii	
ABSTRAK.....	xiv	
BAB I		
	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	7
	C. Tujuan Penelitian.....	7
	D. Tinjauan Pustaka.....	8
	E. Metode Penelitian.....	24
BAB II		
	TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN DAERAH ISTIMEWA DALAM NKRI.....	27
	A. Otonomi Daerah.....	27
	B. Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	32

C.	Daerah Istimewa.....	45
BAB III	URGENSI PASAL 16 DAN 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....	56
A.	Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Dilarang Turut Serta Dalam Perusahaan dan Berpartai Politik Menurut UU Nomor 13 Tahun 2012.....	56
B.	Larangan Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Dalam Pasal 16 dan 17 UU Nomor 13 Tahun 2012 Menurut UUD 1945.....	64
BAB IV	PENUTUP.....	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA